

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Perkembangan dan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ketiga, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, 1990, *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Varia Peradilan.
- Ricardo Simanjuntak, 2006, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, PT Gramedia, Jakarta.

- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Sukabumi.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandar Maju, Bandung.
- Salim H.S, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2006. *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta,
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Paparang, Fatmah, "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak", 2016, Vol.22/No.6/Juli/2016, Jurnal Hukum Unsrat.
- Nento, Ficky, "Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016.

Tesis

- Abdi, Jusra, 2009, *Tinjauan Hukum Terhadap Power Purchase Agreement (PPA) Antara PT Paiton Energy Company Dengan Perusahaan Umum Listrik*

Negara (PLN), Tesis, Program Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Maccirina, A. Saputra, 2009, *Tanggungjawab PT PLN (Persero) dan Pihak Instalatir Terhadap Konsumen Listrik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) di Kota Makasar*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pasaribu, Predy, 2006, *Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT PLN (Persero) Dengan Pelanggan Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis, Program Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Retno Pristia Progo, Teodota, 2015, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT PLN (Persero) Area Samarinda Dengan Pelanggan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Janah, Siti Nur, 2007, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT PLN Batam Dengan Konsumen Dilihat Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) jo. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530)

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1255)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Permen ESDM No. 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1525)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015.

Internet

Bung Prokol, “Batalnya Suatu Perjanjian”,
<https://www.hukumonline.com/linik/detail/cl3520/batalnya-suatu-perjanjian> diakses 18 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

- Diana Kusumasari, “Klausula Eksonerasi”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi> diakses 03 Februari 2019 pukul 10.00 WIB.
- J. Satrio, ”Pelaksanaan Suatu Perjanjian: Perjanjian Yang Sah Dapat Dibatalkan Sepihak”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5ed62d973a7/pelaksanaan-suatu-perjanjian--perjanjian-yang-sah-dapat-dibatalkan-sepihak/> diakses 6 Juli 2019 pukul 10.00 WIB.
- Kenny Winston, “Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata Dalam Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi: Perbedaan Pandangan Hukum”,
<https://www.kennywiston.com/penge-sampingan-pasal-1266-dan-1267-kuhper-dalam-perjanjian-pekerjaan-jasa-konstruksi-perbedaan-pandangan-hukum/> diakses 6 Juli 2019 pukul 09.00 WIB.
- Muhammad Mahathir, “Hukum Perdata (Perikatan/Perjanjian)”,
<http://mahathir71.blogspot.com/2011/06/hukum-perdata-perikatanperjanjian.html> diakses 17 Januari 2018 pukul 11.00 WIB.

Dokumen Lainnya

- Booklet *Energi Berkeadilan 4 Tahun Kinerja Hingga kuartal III 2018*,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Executive Summary* Kesiapan PLN Dalam Implementasi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PLN, Acara Sosialisasi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, 27 November 2018, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Wanhar, 2018, *Regulasi Sertifikasi Laik Operasi Plts Atap*, Acara Sosialisasi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, 28 November 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia